

Menstruktur Problem Kebijakan Pendidikan Islam

Kemas M Raihan Rosadi^{*1}, Su'aidi², Minnah el Widdah², Nur Anisyah¹,

Indrawati¹

¹Institut Islam Ma'arif Jambi, Indonesia

²UIN STS Jambi, Indonesia

Email: kemasmraihan17@gmail.com*

Abstrak

Strukturisasi problem kebijakan pendidikan Islam merupakan aspek fundamental dalam pengembangan sistem pendidikan yang efektif dan berkelanjutan. Studi ini mengeksplorasi proses, strategi, dan tantangan dalam menstrukturkan problematika kebijakan pendidikan Islam secara komprehensif. Analisis meliputi identifikasi dan pemetaan masalah, kerangka analisis dalam strukturisasi kebijakan, serta strategi implementasi dan evaluasi. Pembahasan mencakup pendekatan sistemik dalam menganalisis permasalahan makro pendidikan Islam, model-model strukturisasi masalah, serta teknik pemetaan hubungan sebab-akibat. Tantangan signifikan seperti kompleksitas sistem pendidikan, keterbatasan sumber daya, dan dinamika sosial-budaya juga dikaji secara mendalam. Studi ini menyoroti pentingnya keseimbangan antara idealisme dan pragmatisme dalam perumusan kebijakan, serta implikasi strategis dalam implementasinya. Kesimpulannya, strukturisasi problem kebijakan pendidikan Islam membutuhkan pendekatan holistik dan adaptif, yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan tuntutan modernitas, serta memerlukan kolaborasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan.

Kata Kunci: Kebijakan Pendidikan Islam; Strukturisasi Masalah; Analisis Kebijakan

PENDAHULUAN

Pendidikan Islam di era modern menghadapi berbagai tantangan kompleks yang membutuhkan pendekatan sistematis dalam perumusan kebijakan.¹ Dinamika global, perkembangan teknologi, serta perubahan sosial-budaya telah menciptakan lapisan permasalahan yang saling terkoneksi dalam sistem pendidikan Islam. Kondisi ini menuntut para pemangku kebijakan untuk memiliki kemampuan dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan menstrukturkan masalah secara komprehensif

¹ Ahmad Fauzan, "Model Implementasi Kebijakan Publik," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 17929–17938, <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.12674>.

sebelum merumuskan solusi kebijakan yang efektif.²

Kompleksitas permasalahan dalam kebijakan pendidikan Islam tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan parsial atau solusi yang bersifat reaktif. Setiap masalah dalam pendidikan Islam memiliki akar yang dalam dan terhubung dengan berbagai aspek, mulai dari kurikulum, sumber daya manusia, infrastruktur, hingga aspek sosial-ekonomi masyarakat.³ Oleh karena itu, diperlukan suatu kerangka berpikir yang sistematis untuk memahami dan menstrukturkan problematika yang ada secara holistik.

Menstrukturkan problem kebijakan pendidikan Islam merupakan langkah krusial dalam proses perumusan kebijakan yang efektif. Proses ini melibatkan identifikasi masalah, analisis hubungan sebab-akibat, pemetaan stakeholder, serta pemahaman mendalam tentang konteks sosial-budaya di mana kebijakan tersebut akan diimplementasikan⁴. Dengan struktur yang jelas, para pengambil kebijakan dapat memahami kompleksitas permasalahan secara lebih baik dan merancang solusi yang lebih tepat sasaran.⁵

Dalam konteks Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, menstrukturkan problem kebijakan pendidikan Islam menjadi semakin relevan dan mendesak⁶. Berbagai lembaga pendidikan Islam, mulai dari madrasah hingga perguruan tinggi Islam, menghadapi tantangan yang beragam namun saling terkait. Tantangan-tantangan tersebut mencakup aspek kualitas pembelajaran, relevansi

² Hasan Syahrizal, Minnah El Widdah, dan Su'aidi, "Menstruktur Problem Kebijakan Pendidikan Islam (Sebuah Pemahaman Problem-Problem Kebijakan Pendidikan Islam)," *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora* 2, no. 1 (2024): 73–83, <https://doi.org/10.61104/jq.v1i2.134>.

³ Aam Slamet Rusydiana, Akmal Salim Ruhana, dan Aisyah As-Salafiyah, "PROBLEMATIKA PENERAPAN JAMINAN PRODUK HALAL DI INDONESIA: ANALISIS TATA KELOLA HALAL," *Harmoni: Jurnal Multikultural & Multireligius* 22, no. 1 (2023): 167–186, <https://jurnalharmoni.kemenag.go.id/index.php/harmoni/article/download/572/351>.

⁴ Diky Wahyudi, Cahya Ayu Kamila, dan Sri Wulandari Agustin, "Peran Kepemimpinan dalam Pengembangan Mutu Pendidikan Islam," *Jurnal Syntax Transformation* 2, no. 7 (2021): 949–957, <https://doi.org/10.46799/jst.v2i7.334>.

⁵ Hendri Kurniadi, Wawan Wahyudin, dan Nana Surya Permana, "Implementation of Scientific and Standard Approaches to PAI Learning in the Formation of Student Morals," *Formosa Journal of Sustainable Research (FJSR)* 1, no. 1 (2022): 821–840, <https://doi.org/10.55927/fjsr.v1i6.1748>.

⁶ Milahtul Latifah, "Kyai and the Phenomenon of Socio-Religious Patriarchy; Semantic Construct Analysis of the Meaning of Al-Rijāl and An-Nisā in the Qur'an," *al-Afkar: Journal For Islamic Studies* 7, no. 2 (2024): 459–487, <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i2.961>.

kurikulum dengan kebutuhan zaman, profesionalisme tenaga pendidik, hingga ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Pemahaman yang mendalam tentang struktur permasalahan ini akan membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) sebagai pendekatan utama dalam mengkaji dan menstruktur problematika kebijakan pendidikan Islam. Penelitian kepustakaan merupakan metode yang memanfaatkan berbagai sumber literatur sebagai bahan utama untuk menggali data, menganalisis konsep, serta menyusun pemikiran secara sistematis dan argumentatif. Metode ini dipilih karena permasalahan kebijakan pendidikan Islam bersifat kompleks dan membutuhkan pendekatan teoritis yang mendalam guna memahami akar persoalan serta membangun kerangka analisis yang tepat.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dari berbagai sumber pustaka yang kredibel dan relevan dengan fokus kajian. Sumber-sumber tersebut meliputi buku-buku ilmiah, jurnal nasional dan internasional, artikel akademik, tesis, disertasi, prosiding seminar, serta dokumen-dokumen kebijakan pendidikan Islam baik di tingkat nasional maupun global. Selain itu, literatur klasik Islam yang membahas prinsip-prinsip dasar pendidikan dan tata kelola sosial, seperti karya Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, dan tokoh-tokoh pendidikan Islam lainnya, dijadikan rujukan normatif dalam menelusuri dasar filosofis dan historis dari kebijakan pendidikan Islam.

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan menyeleksi dokumen dan literatur yang memiliki keterkaitan langsung dengan tema penelitian. Peneliti memfokuskan pencarian pada isu-isu kebijakan pendidikan, mulai dari perumusan visi, perencanaan kurikulum, distribusi kewenangan, hingga aspek pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pendidikan Islam. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya berfokus pada konten kebijakan yang bersifat tekstual, tetapi juga pada struktur dan dinamika di balik terbentuknya kebijakan tersebut.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*), yaitu metode yang digunakan untuk menelaah isi dan makna dari dokumen secara sistematis dan

kritis. Dalam proses analisis, peneliti mengidentifikasi isu-isu utama dalam kebijakan pendidikan Islam, menyusun kategorisasi masalah, serta merumuskan hubungan antara akar masalah dan dampak kebijakan yang muncul. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk menyusun kerangka berpikir yang runtut dan terstruktur dalam menjelaskan problematika kebijakan yang sedang dikaji.

Pendekatan dalam penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dan reflektif-kritis. Deskriptif-analitis digunakan untuk memetakan permasalahan secara objektif berdasarkan data literatur yang ada, sedangkan reflektif-kritis digunakan untuk mengevaluasi kelemahan kebijakan serta menyusun kerangka pemecahan masalah yang berbasis nilai-nilai keislaman dan prinsip pendidikan yang berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya membahas permasalahan kebijakan pendidikan Islam secara teoritis, tetapi juga memberikan landasan konseptual untuk merumuskan strategi perbaikannya secara sistemik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Identifikasi Dan Pemetaan Problem Kebijakan Pendidikan Islam

Analisis permasalahan makro pendidikan Islam merupakan tahap fundamental dalam memahami kompleksitas kebijakan pendidikan Islam secara menyeluruh. Pada tingkat makro, pendidikan Islam menghadapi berbagai tantangan sistemik seperti disparitas kualitas antarlembaga, keterbatasan anggaran pendidikan, kesenjangan akses pendidikan, serta dinamika global yang mempengaruhi sistem pendidikan.⁷ Analisis makro ini juga mencakup aspek kebijakan nasional, regulasi pendidikan, standardisasi mutu, serta keterkaitan antara pendidikan Islam dengan sistem pendidikan nasional secara keseluruhan. Pemahaman terhadap permasalahan makro ini menjadi basis penting dalam merumuskan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan.

Identifikasi isu-isu strategis dan prioritas dalam pendidikan Islam dilakukan melalui pengkajian mendalam terhadap berbagai permasalahan yang ada untuk menentukan urgensi dan dampaknya.⁸ Isu-isu strategis ini mencakup aspek kurikulum yang perlu pembaruan, peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan,

⁷ Wahyudi, Kamila, dan Agustin, "Peran Kepemimpinan dalam Pengembangan Mutu Pendidikan Islam."

⁸ Fauzan, "Model Implementasi Kebijakan Publik."

pengembangan infrastruktur pembelajaran, serta penguatan sistem manajemen dan tata kelola lembaga pendidikan Islam.⁹ Proses identifikasi ini mempertimbangkan berbagai faktor seperti kebutuhan masyarakat, tuntutan zaman, serta kapasitas sumber daya yang tersedia. Penentuan prioritas dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, dampak, serta ketersediaan sumber daya.

Pemetaan stakeholder dan kepentingannya merupakan langkah krusial dalam memahami dinamika dan kompleksitas kebijakan pendidikan Islam. Stakeholder dalam konteks ini meliputi pemerintah pusat dan daerah, lembaga pendidikan Islam, guru dan tenaga kependidikan, siswa dan orang tua, masyarakat, serta dunia usaha dan industri. Setiap stakeholder memiliki kepentingan, kebutuhan, dan ekspektasi yang berbeda terhadap pendidikan Islam.¹⁰ Pemahaman yang mendalam tentang peran dan kepentingan masing-masing stakeholder akan membantu dalam merumuskan kebijakan yang dapat mengakomodasi berbagai kepentingan secara proporsional dan berkeadilan.

Analisis kesenjangan antara kondisi ideal dan realitas merupakan tahap penting dalam mengidentifikasi area-area yang membutuhkan intervensi kebijakan. Kondisi ideal mencakup standar mutu pendidikan yang diharapkan, baik dari segi akademik, karakter, maupun kompetensi lulusan yang dibutuhkan masyarakat. Sementara itu, realitas di lapangan seringkali menunjukkan berbagai keterbatasan dan tantangan dalam mencapai standar tersebut.¹¹ Kesenjangan ini dapat terlihat dalam berbagai aspek seperti kualitas pembelajaran, sarana prasarana, kompetensi pendidik, sistem evaluasi, hingga relevansi kurikulum dengan kebutuhan zaman. Analisis kesenjangan ini menjadi dasar dalam menentukan target dan strategi implementasi kebijakan yang realistis dan terukur.

Evaluasi dampak kebijakan pendidikan Islam perlu dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan untuk mengukur efektivitas implementasi kebijakan.

⁹ Syahrizal dan El Widdah, "Menstruktur Problem Kebijakan Pendidikan Islam (Sebuah Pemahaman Problem-Problem Kebijakan Pendidikan Islam)."

¹⁰ Kurniadi, Wahyudin, dan Permana, "Implementation of Scientific and Standard Approaches to PAI Learning in the Formation of Student Morals."

¹¹ Latifah, "Kyai and the Phenomenon of Socio-Religious Patriarchy; Semantic Construct Analysis of the Meaning of Al-Rijāl and An-Nisā in the Qur'an."

Proses evaluasi ini mencakup pengukuran capaian kuantitatif dan kualitatif, identifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta analisis keberlanjutan program. Hasil evaluasi menjadi masukan berharga untuk penyempurnaan kebijakan di masa mendatang dan memastikan tercapainya tujuan pendidikan Islam yang berkualitas dan berkelanjutan.

Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi yang terintegrasi merupakan komponen penting dalam manajemen kebijakan pendidikan Islam. Sistem ini harus mampu mengumpulkan data yang akurat dan tepat waktu tentang berbagai aspek implementasi kebijakan, mulai dari input, proses, hingga output pendidikan. Ketersediaan data yang valid dan reliable menjadi dasar pengambilan keputusan berbasis bukti dan mendukung perbaikan berkelanjutan dalam sistem pendidikan Islam.

Penguatan kapasitas kelembagaan pendidikan Islam menjadi fokus utama dalam implementasi kebijakan. Hal ini mencakup pengembangan sumber daya manusia, peningkatan infrastruktur, modernisasi sistem manajemen, serta penguatan jaringan kerjasama dengan berbagai pihak. Upaya penguatan kelembagaan ini bertujuan untuk membangun fondasi yang kokoh bagi pengembangan pendidikan Islam yang berkualitas dan berdaya saing.

Integrasi teknologi dalam sistem pendidikan Islam merupakan tantangan sekaligus peluang yang perlu direspons secara strategis. Kebijakan pendidikan Islam harus mampu mengakomodasi perkembangan teknologi digital sambil tetap mempertahankan nilai-nilai fundamental pendidikan Islam. Hal ini mencakup pengembangan platform pembelajaran digital, peningkatan literasi digital pendidik dan peserta didik, serta pemanfaatan teknologi untuk efisiensi manajemen pendidikan.

B. Kerangka Analisis Dalam Strukturisasi Problem Kebijakan

Pendekatan sistem dalam analisis kebijakan pendidikan Islam merupakan metodologi yang memandang permasalahan pendidikan sebagai suatu kesatuan yang saling terkait. Pendekatan ini mengakui bahwa setiap elemen dalam sistem pendidikan Islam, mulai dari input, proses, hingga output, memiliki hubungan yang kompleks dan

saling mempengaruhi¹². Melalui pendekatan sistem, para pengambil kebijakan dapat memahami bagaimana perubahan pada satu elemen dapat berdampak pada elemen lainnya, serta bagaimana faktor eksternal dapat mempengaruhi keseluruhan sistem pendidikan Islam.

Model-model strukturisasi masalah kebijakan dalam pendidikan Islam mencakup berbagai pendekatan teoretis dan praktis yang dapat digunakan untuk mengorganisir dan menganalisis permasalahan secara sistematis. Beberapa model yang umum digunakan termasuk model hierarki masalah yang mengklasifikasikan permasalahan berdasarkan tingkat kompleksitas dan urgensinya, model jaringan yang memetakan keterkaitan antar masalah, serta model matriks yang menganalisis hubungan antara berbagai variabel kebijakan¹³. Pemilihan model yang tepat sangat bergantung pada karakteristik masalah yang dihadapi dan konteks implementasi kebijakan.

Analisis hubungan sebab-akibat (*causal mapping*) menjadi instrumen penting dalam memahami akar permasalahan dan dampak yang ditimbulkan dalam sistem pendidikan Islam. Melalui causal mapping, dapat diidentifikasi faktor-faktor yang menjadi pemicu permasalahan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung¹⁴. Teknik ini membantu dalam memvisualisasikan rantai hubungan antar masalah, mengidentifikasi titik-titik kritis yang memerlukan intervensi, serta memahami konsekuensi potensial dari setiap alternatif kebijakan yang diambil.

Teknik dan instrumen dalam strukturisasi masalah melibatkan berbagai metode analitis yang dapat digunakan untuk mengumpulkan, mengorganisir, dan menganalisis data dan informasi. Hal ini mencakup penggunaan metode kuantitatif seperti survei, analisis statistik, dan pemodelan, serta metode kualitatif seperti wawancara mendalam, focus group discussion, dan analisis dokumen. Kombinasi berbagai teknik dan instrumen ini memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap

¹² Syahrizal dan El Widdah, "Menstruktur Problem Kebijakan Pendidikan Islam (Sebuah Pemahaman Problem-Problem Kebijakan Pendidikan Islam)."

¹³ Wahyudi, Kamila, dan Agustin, "Peran Kepemimpinan dalam Pengembangan Mutu Pendidikan Islam."

¹⁴ Kurniadi, Wahyudin, dan Permana, "Implementation of Scientific and Standard Approaches to PAI Learning in the Formation of Student Morals."

kompleksitas permasalahan pendidikan Islam¹⁵.

Dalam implementasinya, strukturisasi masalah kebijakan pendidikan Islam juga mempertimbangkan aspek dinamika temporal dan kontekstual. Hal ini meliputi analisis tren historis, proyeksi masa depan, serta pertimbangan terhadap berbagai faktor kontekstual seperti kondisi sosial-budaya, ekonomi, politik, dan teknologi yang dapat mempengaruhi efektivitas kebijakan. Pemahaman terhadap dimensi waktu dan konteks ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dirumuskan tidak hanya relevan untuk kondisi saat ini tetapi juga adaptif terhadap perubahan di masa depan.¹⁶

Keberhasilan dalam strukturisasi masalah kebijakan pendidikan Islam juga bergantung pada kapasitas dan kompetensi para pengambil kebijakan dalam menggunakan berbagai pendekatan, model, dan instrumen analisis secara efektif.¹⁷ Hal ini membutuhkan pengembangan kapasitas yang berkelanjutan, termasuk pemahaman terhadap metodologi penelitian kebijakan, kemampuan analitis, serta pemahaman yang mendalam tentang konteks pendidikan Islam. Selain itu, kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan dan ahli di bidang terkait juga menjadi faktor kunci dalam memastikan kualitas dan ketepatan analisis yang dilakukan.

Pengembangan indikator kinerja dan sistem pengukuran menjadi aspek krusial dalam strukturisasi masalah kebijakan pendidikan Islam. Indikator yang dikembangkan harus mencakup aspek kuantitatif dan kualitatif, serta mampu mengukur efektivitas kebijakan pada berbagai tingkatan implementasi. Sistem pengukuran yang komprehensif ini memungkinkan evaluasi yang objektif terhadap pencapaian tujuan kebijakan dan identifikasi area-area yang memerlukan perbaikan atau penyesuaian.

Analisis risiko dan manajemen ketidakpastian merupakan komponen penting dalam strukturisasi masalah kebijakan pendidikan Islam. Proses ini melibatkan identifikasi berbagai faktor risiko yang mungkin mempengaruhi implementasi

¹⁵ Rusydiana, Ruhana, dan As-Salafiyah, "PROBLEMATIKA PENERAPAN JAMINAN PRODUK HALAL DI INDONESIA: ANALISIS TATA KELOLA HALAL."

¹⁶ Fauzan, "Model Implementasi Kebijakan Publik."

¹⁷ Latifah, "Kyai and the Phenomenon of Socio-Religious Patriarchy; Semantic Construct Analysis of the Meaning of Al-Rijāl and An-Nisā in the Qur'an."

kebijakan, penilaian dampak potensial, serta pengembangan strategi mitigasi yang sesuai. Pemahaman terhadap aspek risiko dan ketidakpastian ini membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih adaptif dan resilient terhadap berbagai tantangan yang mungkin muncul.

Integrasi perspektif multidisipliner dalam analisis kebijakan pendidikan Islam menjadi semakin penting mengingat kompleksitas permasalahan yang dihadapi. Pendekatan ini menggabungkan wawasan dari berbagai bidang seperti pendidikan, sosiologi, ekonomi, psikologi, dan teknologi informasi untuk memberikan pemahaman yang lebih holistik terhadap isu-isu kebijakan. Perspektif multidisipliner ini juga membantu dalam mengidentifikasi solusi inovatif yang mungkin tidak terlihat ketika menggunakan pendekatan single-discipline.

Penguatan basis data dan sistem informasi dalam strukturisasi masalah kebijakan merupakan fondasi penting untuk analisis yang berbasis bukti. Sistem informasi yang terintegrasi memungkinkan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data secara efektif untuk mendukung pengambilan keputusan. Ketersediaan data yang akurat dan terbaru juga memfasilitasi monitoring dan evaluasi berkelanjutan terhadap implementasi kebijakan, serta mendukung proses pembelajaran dan perbaikan berkelanjutan dalam sistem pendidikan Islam.

C. Strategi Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Pendidikan Islam

Perumusan alternatif solusi kebijakan dalam konteks pendidikan Islam merupakan tahap krusial yang membutuhkan pertimbangan mendalam terhadap berbagai opsi yang tersedia. Proses ini melibatkan identifikasi berbagai pendekatan potensial untuk mengatasi permasalahan yang telah distrukturkan sebelumnya. Setiap alternatif solusi perlu mempertimbangkan berbagai aspek seperti efektivitas, efisiensi, sustainabilitas, serta dampak sosial-budaya yang mungkin ditimbulkan.¹⁸ Dalam konteks pendidikan Islam, alternatif solusi yang dirumuskan harus sejalan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam, sambil tetap memperhatikan tuntutan modernitas

¹⁸ Syahrizal dan El Widdah, "Menstruktur Problem Kebijakan Pendidikan Islam (Sebuah Pemahaman Problem-Problem Kebijakan Pendidikan Islam)."

dan kebutuhan masyarakat kontemporer.

Analisis kelayakan implementasi kebijakan merupakan tahap evaluasi mendalam terhadap setiap alternatif solusi yang telah dirumuskan. Analisis ini mencakup berbagai dimensi kelayakan, termasuk kelayakan teknis yang berkaitan dengan ketersediaan teknologi dan infrastruktur, kelayakan ekonomi yang mempertimbangkan ketersediaan sumber daya finansial, serta kelayakan sosial yang mempertimbangkan penerimaan masyarakat dan dampak sosial-budaya.¹⁹ Dalam konteks pendidikan Islam, analisis kelayakan juga harus mempertimbangkan aspek kesesuaian dengan syariat dan nilai-nilai Islam, serta kapasitas lembaga pendidikan Islam dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Monitoring kebijakan pendidikan Islam dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan untuk memastikan implementasi berjalan sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan. Proses monitoring ini melibatkan pengumpulan data dan informasi secara reguler tentang berbagai aspek implementasi kebijakan, termasuk pencapaian target, kendala yang dihadapi, serta perubahan konteks yang mungkin mempengaruhi efektivitas kebijakan.²⁰ Sistem monitoring yang efektif membutuhkan instrumen yang tepat, mekanisme pengumpulan data yang sistematis, serta keterlibatan aktif dari berbagai pemangku kepentingan dalam proses pemantauan.

Evaluasi kebijakan merupakan proses penilaian komprehensif terhadap efektivitas dan dampak kebijakan yang telah diimplementasikan²¹. Evaluasi ini tidak hanya fokus pada pencapaian target-target kuantitatif, tetapi juga mempertimbangkan aspek kualitatif seperti peningkatan kualitas pembelajaran, penguatan nilai-nilai Islam, serta dampak sosial yang lebih luas.²² Proses evaluasi melibatkan analisis mendalam terhadap data dan informasi yang dikumpulkan selama proses monitoring, serta penilaian terhadap relevansi dan keberlanjutan kebijakan dalam konteks yang terus

¹⁹ Wahyudi, Kamila, dan Agustin, "Peran Kepemimpinan dalam Pengembangan Mutu Pendidikan Islam."

²⁰ Kurniadi, Wahyudin, dan Permana, "Implementation of Scientific and Standard Approaches to PAI Learning in the Formation of Student Morals."

²¹ Rusydiana, Ruhana, dan As-Salafiyah, "PROBLEMATIKA PENERAPAN JAMINAN PRODUK HALAL DI INDONESIA: ANALISIS TATA KELOLA HALAL."

²² Latifah, "Kyai and the Phenomenon of Socio-Religious Patriarchy; Semantic Construct Analysis of the Meaning of Al-Rijāl and An-Nisā in the Qur'an."

berubah.

Strategi penyesuaian kebijakan dikembangkan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan. Penyesuaian ini dapat mencakup modifikasi target, revisi pendekatan implementasi, atau bahkan reformulasi kebijakan jika diperlukan.²³ Proses penyesuaian harus dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk feedback dari stakeholder, perubahan konteks implementasi, serta pembelajaran dari pengalaman implementasi sebelumnya. Fleksibilitas dalam melakukan penyesuaian merupakan kunci penting dalam memastikan efektivitas kebijakan pendidikan Islam dalam jangka panjang.

Pengembangan berkelanjutan menjadi aspek integral dalam implementasi kebijakan pendidikan Islam. Hal ini mencakup upaya sistematis untuk terus meningkatkan kualitas implementasi kebijakan, mengembangkan kapasitas lembaga dan sumber daya manusia, serta membangun sistem yang adaptif terhadap perubahan. Strategi pengembangan berkelanjutan juga melibatkan penguatan jejaring dan kolaborasi antar lembaga pendidikan Islam, pengembangan inovasi dalam pembelajaran dan manajemen pendidikan, serta upaya kontinyu untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Melalui pendekatan pengembangan berkelanjutan ini, diharapkan kebijakan pendidikan Islam dapat terus relevan dan efektif dalam menjawab tantangan zaman.

KESIMPULAN

Strukturisasi problem kebijakan pendidikan Islam merupakan proses yang kompleks dan membutuhkan pendekatan sistematis dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan merumuskan solusi. Melalui identifikasi dan pemetaan yang komprehensif, berbagai permasalahan dalam pendidikan Islam dapat dipahami secara lebih mendalam, mulai dari aspek makro hingga mikro, serta keterkaitan antara berbagai stakeholder yang terlibat. Pemahaman yang mendalam terhadap kompleksitas permasalahan ini menjadi landasan penting dalam merumuskan kebijakan yang efektif

²³ Fauzan, "Model Implementasi Kebijakan Publik."

dan berkelanjutan.

Kerangka analisis dalam strukturisasi problem kebijakan menjadi instrumen penting yang memungkinkan para pengambil kebijakan untuk memahami permasalahan secara sistematis dan terukur. Melalui berbagai pendekatan, model, dan teknik analisis, kompleksitas permasalahan pendidikan Islam dapat dipetakan dan dipahami dalam konteks yang lebih luas. Pemahaman terhadap hubungan sebab-akibat serta penggunaan berbagai instrumen analisis yang tepat memungkinkan perumusan kebijakan yang lebih terstruktur dan berorientasi pada solusi yang efektif.

Implementasi dan evaluasi kebijakan pendidikan Islam membutuhkan strategi yang komprehensif dan adaptif terhadap berbagai perubahan dan tantangan. Melalui perumusan alternatif solusi yang cermat, analisis kelayakan yang mendalam, serta sistem monitoring dan evaluasi yang efektif, kebijakan pendidikan Islam dapat diimplementasikan secara optimal dan berkelanjutan. Pengembangan strategi penyesuaian dan keberlanjutan menjadi kunci penting dalam memastikan bahwa kebijakan pendidikan Islam dapat terus relevan dan efektif dalam menjawab dinamika zaman, sambil tetap mempertahankan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam yang fundamental.

REFERENSI

- Fauzan, Ahmad. "Model Implementasi Kebijakan Publik." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024). <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.12674>.
- Kurniadi, Hendri, Wawan Wahyudin, dan Nana Surya Permana. "Implementation of Scientific and Standard Approaches to PAI Learning in the Formation of Student Morals." *Formosa Journal of Sustainable Research (FJSR)* 1, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.55927/fjsr.v1i6.1748>.
- Latifah, Milahtul. "Kyai and the Phenomenon of Socio-Religious Patriarchy; Semantic Construct Analysis of the Meaning of Al-Rijāl and An-Nisā in the Qur'an." *al-Afkar: Journal For Islamic Studies* 7, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i2.961>.

- Rusydiana, Aam Slamet, Akmal Salim Ruhana, dan Aisyah As-Salafiyah. "PROBLEMATIKA PENERAPAN JAMINAN PRODUK HALAL DI INDONESIA: ANALISIS TATA KELOLA HALAL." *Harmoni: Jurnal Multikultural & Multireligius* 22, no. 1 (2023). <https://jurnalharmoni.kemenag.go.id/index.php/harmoni/article/download/572/351>.
- Syahrizal, Hasan, Minnah El Widdah, dan Su'aidi. "Menstruktur Problem Kebijakan Pendidikan Islam (Sebuah Pemahaman Problem-Problem Kebijakan Pendidikan Islam)." *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora* 2, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.61104/jq.v1i2.134>.
- Wahyudi, Diky, Cahya Ayu Kamila, dan Sri Wulandari Agustin. "Peran Kepemimpinan dalam Pengembangan Mutu Pendidikan Islam." *Jurnal Syntax Transformation* 2, no. 7 (2021). <https://doi.org/10.46799/jst.v2i7.334>.